



**PERATURAN KALURAHAN NGLORO
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



**KALURAHAN NGLORO
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2024**



**LURAH NGLORO
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN NGLORO
NOMOR 6 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

LURAH NGLORO,

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2024;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. Bahwa Peraturan Kalurahan Ngloro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan serta telah mendapatkan Evaluasi Panewu Kapanewon Saptosari Sesuai dengan Keputusan Panewu an.Bupati Gunungkidul Nomor 45 /KPTS/2024 tanggal 24 Desember 2024 Tentang Hasil Evaluasi Peraturan Kalurahan Ngloro Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun anggaran 2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 nomor 40);
 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 nomor 52);
 10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 22);
17. Peraturan Desa Ngloro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Ngloro Tahun 2019 Nomor 3);
18. Peraturan Kalurahan Ngloro Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Ngloro Tahun 2020 Nomor 2);
19. Peraturan Kalurahan Ngloro Nomor 6 Tahun 2024 Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Ngloro Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLORO

dan

LURAH NGLORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 2.064.945.100,00
2. Belanja Kalurahan	Rp. 2.219.455.890,00
Surplus/(Defisit)	(Rp. 154.510.790,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 154.510.790,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 154.510.790,00
SilPA Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

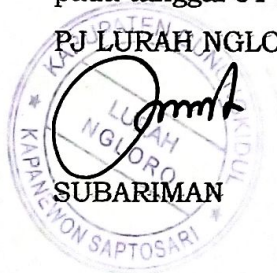
Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ngloro.

Ditetapkan di Ngloro
pada tanggal 31 Desember 2024

PJ LURAH NGLORO,



Diundangkan di Ngloro
pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK NGLORO,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Aris Susmanto".

ARIS SUSMANTO

LEMBARAN KALURAHAN NGLORO TAHUN 2024 NOMOR 6

**BERITA ACARA
PERSETUJUAN DAN KESEPAKATAN BERSAMA
LURAH DAN BAMUSKAL TENTANG RANCANGAN APBKAL
KALURAHAN NGLORO TAHUN 2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Persetujuan dan Kesepakatan bersama Lurah dan Bamuskal tentang Rancangan APBKal di Kalurahan Ngloro Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada :

Hari dan Tanggal : Jum'at, 19 Desember 2024

Jam : 13.00 WIB - Selesai

Tempat : Balai Kalurahan Ngloro

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Kalurahan ini adalah :

A. Materi

1. Pencermatan Evaluasi Rancangan APB Kalurahan

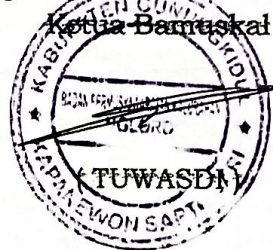
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Kalurahan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Kalurahan dalam rangka penyusunan APB kalurahan yaitu :

1. Rancangan APB Kalurahan Ngloro Tahun 2025

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ngloro, 19 Desember 2024

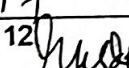
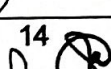
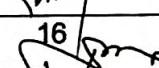
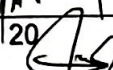
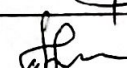


Wakil Peserta


(PARTINEM.....)

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal: Jumat, 19 Desember 2024
Pukul : 13.00 WIB - Selesai
Tempat : Balai Kalurahan Ngloro

NO	NAMA	L/P	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Tuwadi	L	Kep. Pamarokel	Teluk	1 
2.	Aris Setyawan	L	Jagabaya	Ngloro	2 
3.	Suhadi	L	Bukuh	pringurut	3 
4.	Partoem	P	Dukuh	Pip LE	4 
5.	Hendri Wijaya	L	Dukuh	Gebang	5 
6.	ACUNG 'N	L	Bamuskal	Gebang	6 
7.	Partono	L	Bamuskal	Krongko	7 
8.	Suwadi	L	Bamuskal	Pule	8 
9.	Christina. R	P	Bamuskal	Gebang	9 
10.	Endarwati	P	Bamuskal	Kr. Nongko	10 
11.	Silvi Endarti	P	Bamuskal	Ngloro	11 
12.	Cjyo	L	Bamuskal	Ngloro	12 
13.	Sulastri	P	Tatakelasan	Kr. Nongko	13 
14.	Arus Sulamarto	L	Caru	Ngloro	14 
15.	Mukardi	P	Komitau	Krongko	15 
16.	Erstani	L	Pemerintah	Ngloro	16 
17.	Sufinah	P	Danar	Pule	17 
18.	Nugrahas	L	Ulu-ulu	Ngloro	18 
19.	Amung S	L	staf	Ngloro	19 
20.	Karyono	L	staf	Ngloro	20 
21.	Sulacsi	L	DK	KR Nongko	21 
22.					22
23.					23
24.					24
25.					25

26.					26
27.					27
28.					28
29.					29
30.					30

Ngloro, 19.12. 2024

Pj Lurah Ngloro

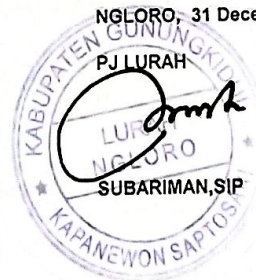

SUBARIMAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN NGLORO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.125.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.049.750.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.070.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.064.945.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	585.526.348,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	614.005.362,00	
5.3.	Belanja Modal	932.609.848,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	87.314.332,00	
	JUMLAH BELANJA	2.219.455.890,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(154.510.790,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	154.510.790,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	154.510.790,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	154.510.790,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGLORO, 31 December 2024



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN NGLORO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.125.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.049.750.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.070.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.064.945.100,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>971.326.327,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	691.660.379,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	449.605.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	449.605.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	29.873.568,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	29.873.568,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	44.674.071,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.674.071,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.905.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.905.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	24.734.160,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.734.160,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	33.820.800,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.820.800,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	97.920.578,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	55.383.728,00	ADD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.556.880,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	33.831.848,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	36.981.850,00	ADD, DLL, PAD, I
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	481.850,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	36.600.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	6.660.000,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.660.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	41.364.200,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	37.600.000,00	PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.600.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	3.854.200,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.854.200,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	138.896.670,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.765.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.765.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	42.500.000,00	PBP
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.382.432,00	ADD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.382.432,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	8.280.512,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.280.512,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.920.288,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.920.288,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	10.000.000,00	PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.045.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.045.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	40.663.438,00	ADD, PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.663.438,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.340.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.340.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	10.000.000,00	PBP
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	1.494.500,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.494.500,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.494.500,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.003.783.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	35.275.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaiannya dll)	11.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa	24.275.000,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	24.275.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	94.480.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	10.300.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	20.780.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.780.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	6.300.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	10.200.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	46.900.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.900.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	838.003.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	99.055.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	99.055.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	237.688.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	237.688.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	207.300.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	207.300.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	293.960.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	293.960.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	32.025.000,00	DDS
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	32.025.000,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.000.000,00	PBH
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	4.000.000,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	59.862.231,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	6.000.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	37.322.943,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	33.002.943,00	DLL, PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.002.943,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	4.320.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.324.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	6.324.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.324.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.216.288,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.275.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.275.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	7.940.288,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.940.288,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	97.170.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	93.125.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	93.125.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.125.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.045.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.045.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.045.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	87.314.332,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	22.514.332,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	22.514.332,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	22.514.332,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	64.800.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	64.800.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	64.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.219.455.890,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(154.510.790,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	154.510.790,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	154.510.790,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

